#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan yaitu lembaga yang mempunyai kegiatan utama meghimpun dan menyalurkan dana, dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Fungsi dari lembaga keuangan ialah sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan uang (modal) dan pihak yang memiliki dana. Lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu lembaga keuangan bank (LKB) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Lembaga keuangan bank merupakan lembaga perantara yang diperbolehkan menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk tabungan, lembaga keuangan bank lebih sering dikenal dengan istilah perbankan. Lembaga keuangan bukan bank yaitu merupakan suatu lembaga keuangan yang tidak diperbolehkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan.

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Bank dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup> Indonesia selain perbankan konvensional juga menerapkan sistem perbankan syariah dimana dari keduanya memiliki tugas pokok yang sama, yang menjadi dasar perbedaan dari keduanya yaitu bank syariah tidak menerapkan sistem bunga

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP,2009), hal.6

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan, edisi revisi 12*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 12

dalam setiap kegiatan operasionalnya dan produk yang dikembangkan sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Bank syariah di Indonesia sudah beroperasi sejak tahun 1992, yang dimulai dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang pesat ini tidak terlepas dari peranan pemerintah yang memberikan kelonggaran serta kesempatan yang besar bagi lembaga keuangan syariah yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Dasar hukum perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 1 yaitu Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>3</sup>

Perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari munculnya banyak lembaga keuangan baik bank dan bukan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. *Baitul Tamwil Muhammadiyah* merupakan salah satu contoh dari berkembangnya lembaga keuangan syariah bukan bank yang menggunakan sistem bagi hasil dalam penyaluran pembiayaan, yang mana lembaga keuangan ini akan beroperasi sesuai dengan tujuan dan fungsinya sehingga diharapkan mampu memberikan solusi baru bagi masyarakat Indonesia terutama dikalangan menengah yang sangat membutuhkan dana tanpa persyaratan dan prosedur yang rumit. Lembaga keuangan syariah ini melayani pengusaha kecil sehingga sangat

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 31-32

cocok untuk mendorong para pelakunya menjadi lebih produktif tanpa terbebani.

Lembaga keuangan mikro yang berjenis koperasi salah satunya adalah Baitul Maal wa Tamwil yakni lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasharufkan dana sosial, sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Perkembangan Baitul Tamwil Muhammadiyah yang kian pesat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pengalokasian dananya memegang peranan penting. Perkembangan lembaga keuangan syariah bukan bank di Kabupaten Tulungagung sudah mulai terasa kerena sudah banyak didirikan Baitul Tamwil Muhammadiyah sebagai lembaga keuangan mikro yang ditumbuhkembangkan oleh masyarakat yang mampu menjangkau masyarakat kecil dan pengusaha kecil sehingga menjadikan Baitul Tamwil Muhammadiyah terus berkembang.

Istilah dalam Bank Konvensional untuk penyaluran dananya disebut dengan kredit atau pinjaman, sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya disebut dengan istilah pembiayaan. Sesuai dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 29:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009),

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal.126

# يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ يَنَاكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ يَخَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا هَ

# Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 29 menjelaskan setiap orang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan bermuamalah, dalam hal ini termasuk pembiayaan. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman dalam melakukan kegiatan muamalah dengan jalan yang batil, tidak sesuai syariat islam.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit J-ART 2004), hal.

Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan di Indonesia Tahun 2015-2016<sup>7</sup>

(dalam miliar rupiah)

8 Provinsi Jambi         4,449,35           9 Provinsi Nangroe Aceh Darussalam         3,013,67           10 Provinsi Sumatera Utara         12,906,24           11 Provinsi Sumatera Barat         4,792,14           12 Provinsi Riau         9,850,25           13 Provinsi Sumatera Selatan         7,880,20           14 Provinsi Kep. Bangka Belitung         1,806,48           15 Provinsi Kep. Riau         2,178,57           16 Provinsi Lampung         6,001,68           17 Provinsi Kalimantan Selatan         7,344,04           18 Provinsi Kalimantan Barat         3,710,28           19 Provinsi Kalimantan Timur         11,792,20           20 Provinsi Kalimantan Tengah         3,949,31           21 Provinsi Kalimantan Utara         1,028,95           22 Provinsi Sulawesi Tengah         2,751,90           23 Provinsi Sulawesi Utara         3,990,88           24 Provinsi Sulawesi Utara         3,990,88           25 Provinsi Sulawesi Barat         615,03           27 Provinsi Sulawesi Tenggara         2,445,10           28 Provinsi Nusa Tenggara Barat         2,563,57           29 Provinsi Maluku         529,23           30 Provinsi Maluku         529,23           31 Provinsi Maluku Utara         472,73		- · ·	(dalam miliar rupiah)
2 Provinsi Banten         25,066,55           3 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta         106,061,06           4 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta         3,384,23           5 Provinsi Jawa Tengah         44,250,78           6 Provinsi Jawa Timur         32,243,53           7 Provinsi Bengkulu         1,706,03           8 Provinsi Jambi         4,449,35           9 Provinsi Nangroe Aceh Darussalam         3,013,67           10 Provinsi Sumatera Utara         12,906,24           11 Provinsi Sumatera Barat         4,792,14           12 Provinsi Sumatera Barat         4,792,14           12 Provinsi Sumatera Selatan         7,880,20           14 Provinsi Kep. Bangka Belitung         1,806,48           15 Provinsi Kep. Bangka Belitung         1,806,48           15 Provinsi Kep. Bangka Belitung         6,001,68           16 Provinsi Lampung         6,001,68           17 Provinsi Kalimantan Selatan         7,344,04           18 Provinsi Kalimantan Barat         3,710,28           19 Provinsi Kalimantan Timur         11,792,20           20 Provinsi Kalimantan Utara         1,028,95           21 Provinsi Sulawesi Tengah         2,751,90           22 Provinsi Gorontalo         1,039,14           25 Provinsi Gorontalo         1,			<u> </u>
3 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta         106,061,06           4 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta         3,384,23           5 Provinsi Jawa Tengah         44,250,78           6 Provinsi Jawa Timur         32,243,53           7 Provinsi Bengkulu         1,706,03           8 Provinsi Jambi         4,449,35           9 Provinsi Nangroe Aceh Darussalam         3,013,67           10 Provinsi Sumatera Utara         12,906,24           11 Provinsi Sumatera Barat         4,792,14           12 Provinsi Riau         9,850,25           13 Provinsi Sumatera Selatan         7,880,20           14 Provinsi Kep. Bangka Belitung         1,806,48           15 Provinsi Kep. Riau         2,178,57           16 Provinsi Kalimantan Selatan         7,344,04           18 Provinsi Kalimantan Barat         3,710,28           19 Provinsi Kalimantan Timur         11,792,20           20 Provinsi Kalimantan Tengah         3,949,31           21 Provinsi Sulawesi Tengah         2,751,90           22 Provinsi Sulawesi Tengah         2,751,90           23 Provinsi Sulawesi Barat         615,03           24 Provinsi Sulawesi Tenggara         2,445,10           25 Provinsi Nusa Tenggara Barat         2,563,57           27 Provinsi Maluku         529,			
4         Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta         3,384,23           5         Provinsi Jawa Tengah         44,250,78           6         Provinsi Jawa Timur         32,243,53           7         Provinsi Bengkulu         1,706,03           8         Provinsi Jambi         4,449,35           9         Provinsi Nangroe Aceh Darussalam         3,013,67           10         Provinsi Sumatera Utara         12,906,24           11         Provinsi Sumatera Barat         4,792,14           12         Provinsi Riau         9,850,25           13         Provinsi Sumatera Selatan         7,880,20           14         Provinsi Kep. Bangka Belitung         1,806,48           15         Provinsi Kep. Riau         2,178,57           16         Provinsi Kep. Riau         2,178,57           16         Provinsi Kalimantan Selatan         7,344,04           18         Provinsi Kalimantan Barat         3,710,28           19         Provinsi Kalimantan Timur         11,792,20           20         Provinsi Kalimantan Utara         3,949,31           21         Provinsi Sulawesi Tengah         2,751,90           23         Provinsi Sulawesi Utara         3,990,88           25			
5         Provinsi Jawa Tengah         44,250,78           6         Provinsi Jawa Timur         32,243,53           7         Provinsi Bengkulu         1,706,03           8         Provinsi Jambi         4,449,35           9         Provinsi Nangroe Aceh Darussalam         3,013,67           10         Provinsi Sumatera Utara         12,906,24           11         Provinsi Sumatera Barat         4,792,14           12         Provinsi Sumatera Selatan         7,880,20           13         Provinsi Kep. Bangka Belitung         1,806,48           15         Provinsi Kep. Bangka Belitung         1,806,48           15         Provinsi Kep. Riau         2,178,57           16         Provinsi Lampung         6,001,68           17         Provinsi Kalimantan Selatan         7,344,04           18         Provinsi Kalimantan Timur         11,792,20           20         Provinsi Kalimantan Tengah         3,949,31           21         Provinsi Kalimantan Utara         1,028,95           22         Provinsi Sulawesi Tengah         2,751,90           23         Provinsi Sulawesi Barat         615,03           24         Provinsi Gorontalo         1,039,14           25			
6 Provinsi Jawa Timur         32,243,53           7 Provinsi Bengkulu         1,706,03           8 Provinsi Jambi         4,449,35           9 Provinsi Nangroe Aceh Darussalam         3,013,67           10 Provinsi Sumatera Utara         12,906,24           11 Provinsi Sumatera Barat         4,792,14           12 Provinsi Sumatera Selatan         7,880,20           13 Provinsi Sumatera Selatan         7,880,20           14 Provinsi Kep. Bangka Belitung         1,806,48           15 Provinsi Kep. Riau         2,178,57           16 Provinsi Kalimantan Selatan         7,344,04           18 Provinsi Kalimantan Barat         3,710,28           19 Provinsi Kalimantan Timur         11,792,20           20 Provinsi Kalimantan Tengah         3,949,31           21 Provinsi Kalimantan Utara         1,028,95           22 Provinsi Sulawesi Tengah         2,751,90           23 Provinsi Sulawesi Utara         3,990,88           25 Provinsi Gorontalo         1,039,14           26 Provinsi Sulawesi Tenggara         2,445,10           27 Provinsi Nusa Tenggara Barat         2,563,57           28 Provinsi Nusa Tenggara Timur         1,038,62           31 Provinsi Maluku         529,23           32 Provinsi Papua         1,478,61			
7 Provinsi Bengkulu         1,706,03           8 Provinsi Jambi         4,449,35           9 Provinsi Nangroe Aceh Darussalam         3,013,67           10 Provinsi Sumatera Utara         12,906,24           11 Provinsi Sumatera Barat         4,792,14           12 Provinsi Riau         9,850,25           13 Provinsi Sumatera Selatan         7,880,20           14 Provinsi Kep. Bangka Belitung         1,806,48           15 Provinsi Kep. Riau         2,178,57           16 Provinsi Lampung         6,001,68           17 Provinsi Kalimantan Selatan         7,344,04           18 Provinsi Kalimantan Barat         3,710,28           19 Provinsi Kalimantan Timur         11,792,20           20 Provinsi Kalimantan Tengah         3,949,31           21 Provinsi Sulawesi Tengah         2,751,90           22 Provinsi Sulawesi Tengah         2,751,90           23 Provinsi Sulawesi Utara         3,990,88           25 Provinsi Gorontalo         1,039,14           26 Provinsi Sulawesi Tenggara         2,445,10           27 Provinsi Sulawesi Tenggara         2,445,10           28 Provinsi Nusa Tenggara Timur         1,058,62           31 Provinsi Maluku         529,23           32 Provinsi Papua         1,478,61           <			
8 Provinsi Jambi         4,449,35           9 Provinsi Nangroe Aceh Darussalam         3,013,67           10 Provinsi Sumatera Utara         12,906,24           11 Provinsi Sumatera Barat         4,792,14           12 Provinsi Riau         9,850,25           13 Provinsi Sumatera Selatan         7,880,20           14 Provinsi Kep. Bangka Belitung         1,806,48           15 Provinsi Kep. Riau         2,178,57           16 Provinsi Lampung         6,001,68           17 Provinsi Kalimantan Selatan         7,344,04           18 Provinsi Kalimantan Barat         3,710,28           19 Provinsi Kalimantan Timur         11,792,20           20 Provinsi Kalimantan Tengah         3,949,31           21 Provinsi Kalimantan Utara         1,028,95           22 Provinsi Sulawesi Tengah         2,751,90           23 Provinsi Sulawesi Utara         3,990,88           24 Provinsi Sulawesi Utara         3,990,88           25 Provinsi Sulawesi Barat         615,03           27 Provinsi Sulawesi Tenggara         2,445,10           28 Provinsi Nusa Tenggara Barat         2,563,57           29 Provinsi Maluku         529,23           31 Provinsi Maluku         529,23           32 Provinsi Papua         1,478,61 <td< th=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
9 Provinsi Nangroe Aceh Darussalam         3,013,67           10 Provinsi Sumatera Utara         12,906,24           11 Provinsi Sumatera Barat         4,792,14           12 Provinsi Riau         9,850,25           13 Provinsi Sumatera Selatan         7,880,20           14 Provinsi Kep. Bangka Belitung         1,806,48           15 Provinsi Kep. Riau         2,178,57           16 Provinsi Lampung         6,001,68           17 Provinsi Kalimantan Selatan         7,344,04           18 Provinsi Kalimantan Barat         3,710,28           19 Provinsi Kalimantan Timur         11,792,20           20 Provinsi Kalimantan Tengah         3,949,31           21 Provinsi Kalimantan Utara         1,028,95           22 Provinsi Sulawesi Tengah         2,751,90           23 Provinsi Sulawesi Selatan         11,189,54           24 Provinsi Sulawesi Utara         3,990,88           25 Provinsi Gorontalo         1,039,14           26 Provinsi Sulawesi Barat         615,03           27 Provinsi Nusa Tenggara Barat         2,563,57           29 Provinsi Maluku         529,23           30 Provinsi Maluku         529,23           31 Provinsi Maluku Utara         472,73           34 Provinsi Papua Barat         813,90			1,706,03
10       Provinsi Sumatera Utara       12,906,24         11       Provinsi Sumatera Barat       4,792,14         12       Provinsi Riau       9,850,25         13       Provinsi Sumatera Selatan       7,880,20         14       Provinsi Kep. Bangka Belitung       1,806,48         15       Provinsi Kep. Riau       2,178,57         16       Provinsi Lampung       6,001,68         17       Provinsi Kalimantan Selatan       7,344,04         18       Provinsi Kalimantan Barat       3,710,28         19       Provinsi Kalimantan Timur       11,792,20         20       Provinsi Kalimantan Tengah       3,949,31         21       Provinsi Kalimantan Utara       1,028,95         22       Provinsi Sulawesi Tengah       2,751,90         23       Provinsi Sulawesi Selatan       11,189,54         24       Provinsi Sulawesi Utara       3,990,88         25       Provinsi Gorontalo       1,039,14         26       Provinsi Sulawesi Barat       615,03         27       Provinsi Nusa Tenggara Barat       2,563,57         29       Provinsi Maluku       529,23         30       Provinsi Maluku       529,23         31       Provinsi Maluk			
11       Provinsi Sumatera Barat       4,792,14         12       Provinsi Riau       9,850,25         13       Provinsi Sumatera Selatan       7,880,20         14       Provinsi Kep. Bangka Belitung       1,806,48         15       Provinsi Kep. Riau       2,178,57         16       Provinsi Lampung       6,001,68         17       Provinsi Kalimantan Selatan       7,344,04         18       Provinsi Kalimantan Barat       3,710,28         19       Provinsi Kalimantan Timur       11,792,20         20       Provinsi Kalimantan Tengah       3,949,31         21       Provinsi Kalimantan Utara       1,028,95         22       Provinsi Sulawesi Tengah       2,751,90         23       Provinsi Sulawesi Selatan       11,189,54         24       Provinsi Sulawesi Utara       3,990,88         25       Provinsi Gorontalo       1,039,14         26       Provinsi Sulawesi Barat       615,03         27       Provinsi Nusa Tenggara       2,445,10         28       Provinsi Nusa Tenggara Barat       2,563,57         29       Provinsi Maluku       529,23         31       Provinsi Maluku       529,23         32       Provinsi Maluku<			3,013,67
12 Provinsi Riau       9,850,25         13 Provinsi Sumatera Selatan       7,880,20         14 Provinsi Kep. Bangka Belitung       1,806,48         15 Provinsi Kep. Riau       2,178,57         16 Provinsi Lampung       6,001,68         17 Provinsi Kalimantan Selatan       7,344,04         18 Provinsi Kalimantan Barat       3,710,28         19 Provinsi Kalimantan Timur       11,792,20         20 Provinsi Kalimantan Tengah       3,949,31         21 Provinsi Kalimantan Utara       1,028,95         22 Provinsi Sulawesi Tengah       2,751,90         23 Provinsi Sulawesi Selatan       11,189,54         24 Provinsi Sulawesi Utara       3,990,88         25 Provinsi Gorontalo       1,039,14         26 Provinsi Sulawesi Barat       615,03         27 Provinsi Sulawesi Tenggara       2,445,10         28 Provinsi Nusa Tenggara Barat       2,563,57         29 Provinsi Bali       7,292,65         30 Provinsi Maluku       529,23         31 Provinsi Maluku       529,23         32 Provinsi Maluku Utara       472,73         34 Provinsi Papua Barat       813,90         35 Diluar Indonesia       3,292,45	10	Provinsi Sumatera Utara	
13       Provinsi Sumatera Selatan       7,880,20         14       Provinsi Kep. Bangka Belitung       1,806,48         15       Provinsi Kep. Riau       2,178,57         16       Provinsi Lampung       6,001,68         17       Provinsi Kalimantan Selatan       7,344,04         18       Provinsi Kalimantan Barat       3,710,28         19       Provinsi Kalimantan Timur       11,792,20         20       Provinsi Kalimantan Tengah       3,949,31         21       Provinsi Kalimantan Utara       1,028,95         22       Provinsi Sulawesi Tengah       2,751,90         23       Provinsi Sulawesi Selatan       11,189,54         24       Provinsi Sulawesi Utara       3,990,88         25       Provinsi Gorontalo       1,039,14         26       Provinsi Sulawesi Barat       615,03         27       Provinsi Sulawesi Tenggara       2,445,10         28       Provinsi Nusa Tenggara Barat       2,563,57         29       Provinsi Nusa Tenggara Timur       1,058,62         31       Provinsi Maluku       529,23         32       Provinsi Maluku       529,23         33       Provinsi Maluku Utara       472,73         34       P	11	Provinsi Sumatera Barat	4,792,14
14 Provinsi Kep. Bangka Belitung       1,806,48         15 Provinsi Kep. Riau       2,178,57         16 Provinsi Lampung       6,001,68         17 Provinsi Kalimantan Selatan       7,344,04         18 Provinsi Kalimantan Barat       3,710,28         19 Provinsi Kalimantan Timur       11,792,20         20 Provinsi Kalimantan Tengah       3,949,31         21 Provinsi Kalimantan Utara       1,028,95         22 Provinsi Sulawesi Tengah       2,751,90         23 Provinsi Sulawesi Selatan       11,189,54         24 Provinsi Sulawesi Utara       3,990,88         25 Provinsi Gorontalo       1,039,14         26 Provinsi Sulawesi Barat       615,03         27 Provinsi Sulawesi Tenggara       2,445,10         28 Provinsi Nusa Tenggara Barat       2,563,57         29 Provinsi Nusa Tenggara Timur       1,058,62         31 Provinsi Maluku       529,23         32 Provinsi Papua       1,478,61         33 Provinsi Maluku Utara       472,73         34 Provinsi Papua Barat       813,90         35 Diluar Indonesia       3,292,45	12	Provinsi Riau	9,850,25
15       Provinsi Kep. Riau       2,178,57         16       Provinsi Lampung       6,001,68         17       Provinsi Kalimantan Selatan       7,344,04         18       Provinsi Kalimantan Barat       3,710,28         19       Provinsi Kalimantan Timur       11,792,20         20       Provinsi Kalimantan Tengah       3,949,31         21       Provinsi Kalimantan Utara       1,028,95         22       Provinsi Sulawesi Tengah       2,751,90         23       Provinsi Sulawesi Selatan       11,189,54         24       Provinsi Gorontalo       1,039,14         26       Provinsi Gorontalo       1,039,14         26       Provinsi Sulawesi Barat       615,03         27       Provinsi Sulawesi Tenggara       2,445,10         28       Provinsi Nusa Tenggara Barat       2,563,57         29       Provinsi Nusa Tenggara Timur       1,058,62         30       Provinsi Maluku       529,23         31       Provinsi Papua       1,478,61         32       Provinsi Maluku Utara       472,73         34       Provinsi Papua Barat       813,90         35       Diluar Indonesia       3,292,45	13	Provinsi Sumatera Selatan	7,880,20
15       Provinsi Kep. Riau       2,178,57         16       Provinsi Lampung       6,001,68         17       Provinsi Kalimantan Selatan       7,344,04         18       Provinsi Kalimantan Barat       3,710,28         19       Provinsi Kalimantan Timur       11,792,20         20       Provinsi Kalimantan Tengah       3,949,31         21       Provinsi Kalimantan Utara       1,028,95         22       Provinsi Sulawesi Tengah       2,751,90         23       Provinsi Sulawesi Selatan       11,189,54         24       Provinsi Gorontalo       1,039,14         26       Provinsi Gorontalo       1,039,14         26       Provinsi Sulawesi Barat       615,03         27       Provinsi Sulawesi Tenggara       2,445,10         28       Provinsi Nusa Tenggara Barat       2,563,57         29       Provinsi Nusa Tenggara Timur       1,058,62         30       Provinsi Maluku       529,23         31       Provinsi Papua       1,478,61         32       Provinsi Maluku Utara       472,73         34       Provinsi Papua Barat       813,90         35       Diluar Indonesia       3,292,45	14	Provinsi Kep. Bangka Belitung	1,806,48
17 Provinsi Kalimantan Selatan       7,344,04         18 Provinsi Kalimantan Barat       3,710,28         19 Provinsi Kalimantan Timur       11,792,20         20 Provinsi Kalimantan Tengah       3,949,31         21 Provinsi Kalimantan Utara       1,028,95         22 Provinsi Sulawesi Tengah       2,751,90         23 Provinsi Sulawesi Selatan       11,189,54         24 Provinsi Sulawesi Utara       3,990,88         25 Provinsi Gorontalo       1,039,14         26 Provinsi Sulawesi Barat       615,03         27 Provinsi Sulawesi Tenggara       2,445,10         28 Provinsi Nusa Tenggara Barat       2,563,57         29 Provinsi Nusa Tenggara Timur       1,058,62         30 Provinsi Maluku       529,23         32 Provinsi Papua       1,478,61         33 Provinsi Maluku Utara       472,73         34 Provinsi Papua Barat       813,90         35 Diluar Indonesia       3,292,45			2,178,57
17 Provinsi Kalimantan Selatan       7,344,04         18 Provinsi Kalimantan Barat       3,710,28         19 Provinsi Kalimantan Timur       11,792,20         20 Provinsi Kalimantan Tengah       3,949,31         21 Provinsi Kalimantan Utara       1,028,95         22 Provinsi Sulawesi Tengah       2,751,90         23 Provinsi Sulawesi Selatan       11,189,54         24 Provinsi Sulawesi Utara       3,990,88         25 Provinsi Gorontalo       1,039,14         26 Provinsi Sulawesi Barat       615,03         27 Provinsi Sulawesi Tenggara       2,445,10         28 Provinsi Nusa Tenggara Barat       2,563,57         29 Provinsi Nusa Tenggara Timur       1,058,62         30 Provinsi Maluku       529,23         32 Provinsi Papua       1,478,61         33 Provinsi Maluku Utara       472,73         34 Provinsi Papua Barat       813,90         35 Diluar Indonesia       3,292,45	16	Provinsi Lampung	6,001,68
19 Provinsi Kalimantan Timur       11,792,20         20 Provinsi Kalimantan Tengah       3,949,31         21 Provinsi Kalimantan Utara       1,028,95         22 Provinsi Sulawesi Tengah       2,751,90         23 Provinsi Sulawesi Selatan       11,189,54         24 Provinsi Sulawesi Utara       3,990,88         25 Provinsi Gorontalo       1,039,14         26 Provinsi Sulawesi Barat       615,03         27 Provinsi Sulawesi Tenggara       2,445,10         28 Provinsi Nusa Tenggara Barat       2,563,57         29 Provinsi Nusa Tenggara Timur       1,058,62         30 Provinsi Nusa Tenggara Timur       1,058,62         31 Provinsi Maluku       529,23         32 Provinsi Papua       1,478,61         33 Provinsi Maluku Utara       472,73         34 Provinsi Papua Barat       813,90         35 Diluar Indonesia       3,292,45	17	Provinsi Kalimantan Selatan	7,344,04
20 Provinsi Kalimantan Tengah       3,949,31         21 Provinsi Kalimantan Utara       1,028,95         22 Provinsi Sulawesi Tengah       2,751,90         23 Provinsi Sulawesi Selatan       11,189,54         24 Provinsi Sulawesi Utara       3,990,88         25 Provinsi Gorontalo       1,039,14         26 Provinsi Sulawesi Barat       615,03         27 Provinsi Sulawesi Tenggara       2,445,10         28 Provinsi Nusa Tenggara Barat       2,563,57         29 Provinsi Bali       7,292,65         30 Provinsi Nusa Tenggara Timur       1,058,62         31 Provinsi Maluku       529,23         32 Provinsi Papua       1,478,61         33 Provinsi Maluku Utara       472,73         34 Provinsi Papua Barat       813,90         35 Diluar Indonesia       3,292,45	18	Provinsi Kalimantan Barat	3,710,28
20 Provinsi Kalimantan Tengah       3,949,31         21 Provinsi Kalimantan Utara       1,028,95         22 Provinsi Sulawesi Tengah       2,751,90         23 Provinsi Sulawesi Selatan       11,189,54         24 Provinsi Sulawesi Utara       3,990,88         25 Provinsi Gorontalo       1,039,14         26 Provinsi Sulawesi Barat       615,03         27 Provinsi Sulawesi Tenggara       2,445,10         28 Provinsi Nusa Tenggara Barat       2,563,57         29 Provinsi Bali       7,292,65         30 Provinsi Nusa Tenggara Timur       1,058,62         31 Provinsi Maluku       529,23         32 Provinsi Papua       1,478,61         33 Provinsi Maluku Utara       472,73         34 Provinsi Papua Barat       813,90         35 Diluar Indonesia       3,292,45	19	Provinsi Kalimantan Timur	11,792,20
21 Provinsi Kalimantan Utara       1,028,95         22 Provinsi Sulawesi Tengah       2,751,90         23 Provinsi Sulawesi Selatan       11,189,54         24 Provinsi Sulawesi Utara       3,990,88         25 Provinsi Gorontalo       1,039,14         26 Provinsi Sulawesi Barat       615,03         27 Provinsi Sulawesi Tenggara       2,445,10         28 Provinsi Nusa Tenggara Barat       2,563,57         29 Provinsi Bali       7,292,65         30 Provinsi Nusa Tenggara Timur       1,058,62         31 Provinsi Maluku       529,23         32 Provinsi Papua       1,478,61         33 Provinsi Maluku Utara       472,73         34 Provinsi Papua Barat       813,90         35 Diluar Indonesia       3,292,45	20	Provinsi Kalimantan Tengah	3,949,31
23 Provinsi Sulawesi Selatan       11,189,54         24 Provinsi Sulawesi Utara       3,990,88         25 Provinsi Gorontalo       1,039,14         26 Provinsi Sulawesi Barat       615,03         27 Provinsi Sulawesi Tenggara       2,445,10         28 Provinsi Nusa Tenggara Barat       2,563,57         29 Provinsi Bali       7,292,65         30 Provinsi Nusa Tenggara Timur       1,058,62         31 Provinsi Maluku       529,23         32 Provinsi Papua       1,478,61         33 Provinsi Maluku Utara       472,73         34 Provinsi Papua Barat       813,90         35 Diluar Indonesia       3,292,45			1,028,95
23 Provinsi Sulawesi Selatan       11,189,54         24 Provinsi Sulawesi Utara       3,990,88         25 Provinsi Gorontalo       1,039,14         26 Provinsi Sulawesi Barat       615,03         27 Provinsi Sulawesi Tenggara       2,445,10         28 Provinsi Nusa Tenggara Barat       2,563,57         29 Provinsi Bali       7,292,65         30 Provinsi Nusa Tenggara Timur       1,058,62         31 Provinsi Maluku       529,23         32 Provinsi Papua       1,478,61         33 Provinsi Maluku Utara       472,73         34 Provinsi Papua Barat       813,90         35 Diluar Indonesia       3,292,45	22	Provinsi Sulawesi Tengah	2,751,90
25 Provinsi Gorontalo       1,039,14         26 Provinsi Sulawesi Barat       615,03         27 Provinsi Sulawesi Tenggara       2,445,10         28 Provinsi Nusa Tenggara Barat       2,563,57         29 Provinsi Bali       7,292,65         30 Provinsi Nusa Tenggara Timur       1,058,62         31 Provinsi Maluku       529,23         32 Provinsi Papua       1,478,61         33 Provinsi Maluku Utara       472,73         34 Provinsi Papua Barat       813,90         35 Diluar Indonesia       3,292,45			11,189,54
25 Provinsi Gorontalo       1,039,14         26 Provinsi Sulawesi Barat       615,03         27 Provinsi Sulawesi Tenggara       2,445,10         28 Provinsi Nusa Tenggara Barat       2,563,57         29 Provinsi Bali       7,292,65         30 Provinsi Nusa Tenggara Timur       1,058,62         31 Provinsi Maluku       529,23         32 Provinsi Papua       1,478,61         33 Provinsi Maluku Utara       472,73         34 Provinsi Papua Barat       813,90         35 Diluar Indonesia       3,292,45	24	Provinsi Sulawesi Utara	3,990,88
27 Provinsi Sulawesi Tenggara       2,445,10         28 Provinsi Nusa Tenggara Barat       2,563,57         29 Provinsi Bali       7,292,65         30 Provinsi Nusa Tenggara Timur       1,058,62         31 Provinsi Maluku       529,23         32 Provinsi Papua       1,478,61         33 Provinsi Maluku Utara       472,73         34 Provinsi Papua Barat       813,90         35 Diluar Indonesia       3,292,45	25	Provinsi Gorontalo	1,039,14
28 Provinsi Nusa Tenggara Barat       2,563,57         29 Provinsi Bali       7,292,65         30 Provinsi Nusa Tenggara Timur       1,058,62         31 Provinsi Maluku       529,23         32 Provinsi Papua       1,478,61         33 Provinsi Maluku Utara       472,73         34 Provinsi Papua Barat       813,90         35 Diluar Indonesia       3,292,45	26	Provinsi Sulawesi Barat	615,03
29 Provinsi Bali       7,292,65         30 Provinsi Nusa Tenggara Timur       1,058,62         31 Provinsi Maluku       529,23         32 Provinsi Papua       1,478,61         33 Provinsi Maluku Utara       472,73         34 Provinsi Papua Barat       813,90         35 Diluar Indonesia       3,292,45	27	Provinsi Sulawesi Tenggara	2,445,10
29 Provinsi Bali       7,292,65         30 Provinsi Nusa Tenggara Timur       1,058,62         31 Provinsi Maluku       529,23         32 Provinsi Papua       1,478,61         33 Provinsi Maluku Utara       472,73         34 Provinsi Papua Barat       813,90         35 Diluar Indonesia       3,292,45	28	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2,563,57
30 Provinsi Nusa Tenggara Timur       1,058,62         31 Provinsi Maluku       529,23         32 Provinsi Papua       1,478,61         33 Provinsi Maluku Utara       472,73         34 Provinsi Papua Barat       813,90         35 Diluar Indonesia       3,292,45			7,292,65
31 Provinsi Maluku       529,23         32 Provinsi Papua       1,478,61         33 Provinsi Maluku Utara       472,73         34 Provinsi Papua Barat       813,90         35 Diluar Indonesia       3,292,45	30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1,058,62
32 Provinsi Papua       1,478,61         33 Provinsi Maluku Utara       472,73         34 Provinsi Papua Barat       813,90         35 Diluar Indonesia       3,292,45			529,23
33 Provinsi Maluku Utara472,7334 Provinsi Papua Barat813,9035 Diluar Indonesia3,292,45	32	Provinsi Papua	1,478,61
34 Provinsi Papua Barat813,9035 Diluar Indonesia3,292,45			472,73
35 Diluar Indonesia 3,292,45	34	Provinsi Papua Barat	813,90
			3,292,45
		Total	400,238,89

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 2018

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Departemen Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, *Statistik...*,2016

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa jumlah pembiayaan di Indonesia adalah Rp.400.238.89,-. Jumlah pembiayaan terbanyak di Indonesia adalah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan jumlah Rp.106.061.06,-. Hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk di wilayah DKI Jakarta yang semakin meningkat setiap tahunnya yang mengakibatkan jumlah pembiayaan juga mengalami peningkatan. Jumlah pembiayaan di Indonesia terendah adalah di Provinsi Maluku Utara dengan jumlah Rp.472.73,-. Hal ini dikarenakan faktor infrastruktur dan fasilitas publik yang menjadi faktor utama penyebab minimnya investasi yang masuk di Maluku Utara.

Tabel 1.2 Jumlah Pembiayaan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016<sup>10</sup>

(dalam miliar rupiah)

Tohum	Triwulan	(uaiaiii iiiiiiai Tupiaii)
Tahun	Triwulan	Jumlah Pembiayaan
	I	18,984
2015	II	19,854
	III	19,936
	IV	20,576
	_	
2016	I	20,226
	II	20,997

Sumber: BI Kajian Ekonimi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Timur, 2018

6

.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. https://jakarta.bps.go.id/ diakses tanggal 12 April 2018 (jam 14:10 wib)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Maluku Utara. http://www.dpr.go.id>dokakd>dokumen, diakses tanggal 24 April 2018 (jam 07:50 wib)

http://www.dpr.go.id>dokakd>dokumen, diakses tanggal 24 April 2018 (jam 07:50 wib)

<sup>10</sup> Bank Indonesia Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Timur, *Statistik...*, 2016

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan bank syariah di Provinsi Jawa Timur pada triwulan II 2016 melambat. Pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp21 triliun pada triwulan II 2016 atau hanya tumbuh 5,75% (yoy). Namun demikian, melambatnya penyaluran pembiayaan tidak mempengaruhi kinerja aset perbankan syariah yang justru meningkat dari 3,48% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi 8,54% (yoy) di triwulan II 2016. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan aset yang diambil alih, penempatan pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia serta aset antar kantor.<sup>11</sup>

Tabel 1.3 Jumlah Pembiayaan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2016<sup>12</sup>

(dalam juta rupiah)

Tahun	Jumlah Pembiayaan
2014	33,218,767
2015	33,151,651,251
2016	42,351,662,539

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2018

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa jumlah pembiayaan di Kabupaten Tulungagung dari tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan secara terus menerus di setiap tahunnya. Tahun 2014 total jumlah pembiayaan sebesar Rp.33.218.767,-, pada tahun 2016 total jumlah pembiayaan naik sebesar Rp.42.351.662.539,-. Peningkatan jumlah pembiayaan ini merupakan salah satu indikator adanya perkembangan kegiatan ekonomi di suatu daerah. Perbankan

<sup>12</sup> Departemen Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, Statistik...,2016

7

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Timur Triwulan II 2016, <a href="https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/jatim/Default.aspx">https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/jatim/Default.aspx</a>

atau koperasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi sehingga peranannya sangat penting dalam kegiatan ekonomi, khususnya bagi permodalan usaha kecil dan menengah.<sup>13</sup>

Mowen berpendapat bahwa persepsi menentukan konsumen dalam memutuskan pembelian suatu produk. Penelitian yang dilakukan oleh Lukytta Gusti Acfira dengan judul "Pengaruh Persepsi Nasabah Terhadap Pengambilan Pembiayaaan Murabahah pada Bank Syariah (Studi Kasus Nasabah pada Bank BNI Syariah cab. Makassar)". Metode yang digunakan adalah regresi, hasil dari penelitian ini bahwa variabel pengetahuan nasabah, kualitas pelayanan, dan reputasi bank berpengaruh secara positif terhadap pengambilan pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk variabel tingkat nilai margin berpengaruh negatif terhadap pengambilan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah. <sup>14</sup>

Konsep Islam mengajarkan komunikasi dalam proses berfikir dengan menggunakan persepsi apabila seseorang mengambil kesimpulan setelah memperhatikan stimulus yang dating sebelumnya, hal ini tampak dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 15-16:

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Statistik Daerah Kabupaten Tulungagung 2016, <a href="https://id.scribd">https://id.scribd</a>. Diakses tanggal 24 April 2018,(Jam 10:15 wib)

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Lukytta Gusti Acfira, *Pengaruh Persepsi Nasabah Terhadap Pengambilan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Nasabah Pada Bank BNI Syariah Cab. Makassar)*, (Makassar: Skripsi tidak diterbitkan, 2014).

# Artinya:

"Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia akan berkata: "Tuhanku telah memuliakanku". Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku". <sup>15</sup>

Promosi merupakan hal lain yang dipertimbangkan masyarakat dalam memilih pembiayaan. Promosi adalah kegiatan perusahaan yang menyebarluaskan arus informasi agar konsumen terus mengingatnya sehingga timbul keinginan konsumen untuk mencoba dan membeli produk perusahaan. Promosi yang efektif yaitu komunikasi dari mulut ke mulut merupakan salah satu saluran komunikasi yang sering digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan suatu produk baik barang atau jasa, sehingga strategi ini dinilai sangat efektif dalam memperlancar proses pemasaran suatu perusahaan. Kottler berpendapat bahwa promosi mencakup semua alat-alat bauran pemasaran atau *marketing mix* yang peran utamanya adalah lebih mengadakan komunikasi yang sifatnya membujuk. Penelitian yang dilakukan oleh Rengganing Jatun dan Rizal Hari Magnadi dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Nasabah untuk Mengambil Pembiayaan pada Kospin Jasa Layanan Syariah Pekalongan". Metode yang digunakan adalah regresi, hasil dari penelitian ini

\_

,

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit J-ART 2004), hal.593

Freddy Rangkuti, Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal.51
 Ibid. hal.49

bahwa variabel pengetahuan produk, aktivitas promosi, dan religiusitas berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah mengambil pembiayaan. <sup>18</sup>

Islam telah mengatur semua kegiatan yang ada dimuka bumi, salah stunya dalam hal bermuamalah. Promosi merupakan suatu kegiatan yang terjadi pada saat bermuamalah, hal ini terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 29:

# Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." 19

Penjelasan dari ayat Al-Qur'an diatas adalah islam menghalalkan umatnya berniaga. Bahkan Rasulullah SAW telah mengajarkan pada umatnya untuk berdagang dengan menjunjung tinggi etika keislaman dan dalam beraktivitas bermuamalah umat islam dilarang melakukan tindakan bathil, namun harus melakukan kgiatan ekonomi dengan cara saling ridho.

Hal yang dipertimbangkan masyarakat dalam memilih pembiayaan selain faktor persepsi, dan promosi adalah faktor bagi hasil. Penentuan besar

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit J-ART 2004), hal.83

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Rengganing Jatun dan Rizal Hari Magnadi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Mengambil Pembiayaan Pada Kospin Jasa Layanan Syariah Pekalongan", *Diponegoro Journal of Management*, 4:2, (Semarang: 2015), hal.9-10

Anifah mengungkapkan bahwa "besarnya tingkat suku bunga pada bank konvensional dapat berpengaruh terhadap bank syariah baik secara langsung maupun tidak langsung". Berbeda dengan sistem bagi hasil yang membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatul Laili dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Murabahah di BPRS Central Syariah Utama Surakarta". Metode yang digunakan adalah analisis faktor, hasil dari penelitian ini bahwa faktor pelayanan, faktor margin, dan faktor produk mempengaruhi proses penentu keputusan nasabah memilih produk pembiayaan murabahah di BPRS Central Syariah Utama Surakarta. Faktor margin adalah faktor yang dominan dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan memilih produk pembiayaan murabahah dengan nilai eigenvalue sebesar 6,033 dengan begitu faktor margin dapat menerangkan data sebesar 50,279%. 20

Kesimpulan dari peneliti ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembiayaan, sehingga dari latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Faktor-Faktor Persepsi, Promosi, dan Bagi Hasil yang Dipertimbangkan Anggota dalam Memilih Pembiayaan di Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung".

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Rahmatul Laili, *Analisis Faktor-Faktor Keputusan Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Murabahah di BPRS Central Syariah Utama Surakarta*, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016).

#### B. Identifikasi Masalah

Latar belakang masalah penelitian ini dapat diidentifikasi masalah persepsi, promosi, dan bagi hasil. Variabel dipertimbangkan atau tidak dipertimbangkan dalam keputusan anggota memilih pembiayaan di koperasi syariah *Baitul Tamwil Muhammadiyah* Surya Dana Campurdarat Tulungagung.

Menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti menentukan batasan masalah. Adapun batasan masalah, sebagai berikut:

- 1. Penelitian berfokus pada faktor-faktor persepsi, promosi, dan bagi hasil.
- 2. Objek dalam penelitian ini adalah anggota pembiayaan di koperasi syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung.

#### C. Rumusan Masalah

- 1. Faktor-faktor persepsi apa sajakah yang dipertimbangkan anggota dalam memilih pembiayaan di koperasi syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung?
- 2. Faktor-faktor promosi apa sajakah yang dipertimbangkan anggota dalam memilih pembiayaan di koperasi syariah *Baitul Tamwil Muhammadiyah* Surya Dana Campurdarat Tulungagung?
- 3. Faktor-faktor bagi hasil apa sajakah yang dipertimbangkan anggota dalam memilih pembiayaan di koperasi syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung?

4. Faktor-faktor persepsi, promosi, dan bagi hasil faktor manakah yang paling dipertimbangkan anggota dalam memilih pembiayaan di koperasi syariah *Baitul Tamwil Muhammadiyah* Surya Dana Campurdarat Tulungagung?

# D. Tujuan Penelitian

- Menganalisa faktor-faktor persepsi yang dipertimbangkan anggota dalam memilih pembiayaan di koperasi syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung.
- Menganalisa faktor-faktor promosi yang dipertimbangkan anggota dalam memilih pembiayaan di koperasi syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung.
- Menganalisa faktor-faktor bagi hasil yang dipertimbangkan anggota dalam memilih pembiayaan di koperasi syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung.
- 4. Menganalisa faktor persepsi, promosi, dan bagi hasil yang paling dipertimbangkan anggota dalam memilih pembiayaan di koperasi syariah *Baitul Tamwil Muhammadiyah* Surya Dana Campurdarat Tulungagung.

# E. Kegunaan Penelitian

# 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan, khususnya di bidang perbankan syariah yang berkaitan dengan faktor-faktor persepsi, promosi, dan bagi hasil yang dipertimbangkan anggota dalam memilih pembiayaan dan tambahan kajian pustaka pada perpustakaan Islam Institut agama Islam Negeri Tulungagung.

# 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, berguna untuk sumbangsih perpustakaan khususnya dalam kajian di dunia perbankan.
- b. Bagi Lembaga dapat memberikan strategi kepada pihak koperasi syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung dalam meningkatkan jumlah anggota.
- c. Bagi penelitian selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai lembaga keuangan syariah dan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian dan alat analisis yang berbeda sehingga nantinya mendapatkan hasil kajian yang lebih mendalam dengan cara mengkaji pengaruh lainnya selain yang sudah diteliti dalam penelitian ini.

# F. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Variabel-variabel yang diteliti adalah variabel persepsi, promosi, dan bagi hasil.
- 2. Penyebaran kuisioner dilakukan di koperasi syariah *Baitul Tamwil Muhammadiyah* Surya Dana Campurdarat Tulungagung.

# G. Penegasan Istilah

Menghindari penafsiran yang berbeda dan mewujudkan kesatuan pandangan serta kesamaan pemikiran, perlu kiranya ditegaskan istilah-istilah

yang berhubungan dengan penelitian ini, adapun penegasan istilah tersebut sebagai berikut:

# 1. Definisi Konseptual

Secara konseptual yang dimaksud dengan "Faktor-Faktor Persepsi, Promosi, dan Bagi Hasil yang Dipertimbangkan Anggota dalam Memilih Pembiayaan di koperasi syariah *Baitul Tamwil Muhammadiyah* Surya Dana Campurdarat" adalah sebagai berikut:

- a. Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indra mereka agar memberikan makna pada lingkungan mereka.<sup>21</sup>
- b. Promosi adalah kegiatan penjualan dan pemasaran dalam rangka menginformasikan dan mendorong permintaan terhadap produk, jasa, dan ide dari perusahaan dengan cara memengaruhi konsumen agar mau membeli produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.<sup>22</sup>
- c. Bagi hasil adalah persentase keuntungan yang akan diperoleh shahibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya.<sup>23</sup>
- d. Anggota adalah konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.<sup>24</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Veitzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hal.231

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Freddy Rangkuti, Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication..., hal.50

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.27

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan, edisi revisi delapan,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 94

e. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>25</sup>

# 2. Definisi Operasional

Penegasan operasional merupakan pelekatan suatu variable dengan cara menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu untuk mengukur variable. Penegasan operasioan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan sejauh mana penafsiran anggota dalam memilih produk pembiayaan.
- b. Promosi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan seberapa besar tingkat promosi menarik nasabah untuk memilih pembiayaan pada koperasi syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat.
- c. Bagi hasil yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tingkat pembagian keuntungan yang besar dibandingankan dengan lembaga keuangan yang lain manun dengan persyaratan yang mudah sehingga dapat menarik nasabah untuk melakukan pembiayaan.
- d. Anggota yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan pembiayaan pada koperasi syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat.

16

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.105-106

e. Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk-produk yang dimiliki koperasi syariah *Baitul Tamwil Muhammadiyah* Surya Dana Campurdarat.

# H. Sistematika Pembahasan Skripsi

Adapun sistematika penyususnan laporan pada penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

### 1. Bagian Awal, terdiri dari:

Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, Transliterasi dan Abstrak.

# 2. Bagian Utama, terdiri dari:

- BAB I Pendahuluan terdiri dari: (a) Latar Belakang Masalah, (b)

  Identifikasi Masalah, (c) Rumusan Masalah, (d) Tujuan
  Penelitian, (e) Kegunaan Penelitian, (f) Ruang Lingkup dan
  Keterbatasan Penelitian, (g) Kegunaan Penelitian, (h)
  Sistematika Pembahasan Skripsi.
- BAB II Landasan Teori terdiri dari: (a) Kerangka Teori yang Membahas Variabel atau Sub Variabel Pertama, (b) Kerangka Teori yang Membahas Variabel atau Sub Variabel Kedua, dan Seterusnya (Jika ada), (c) Kajian Penelitia Terdahulu, (d) Kerangka Konseptual.
- BAB III Metode penelitian terdiri dari: (a) Pendekatan dan Jenis Penelitian, (b) Populasi, Sampling, dan Sampel Penelitian,

- (c) Sumber Data, (d) Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian, (e) Analisis Data.
- BAB IV Hasil penelitian terdiri dari hasil penelitian (yang berisi tentang deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta temuan penelitian.
- BAB V Pembahasan, yaitu pembahasan berdasarkan rumusan masalah.
- BAB VI Penutup terdiri dari kesimpulan dari hasil pembahasan, dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

# 3. Bagian Akhir, terdiri dari:

(a) Daftar Pustaka, (b) Lampiran-Lampiran, (c) Surat Pernyataan Keaslian Skripsi, dan (d) Daftar Riwayat Hidup.